

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Cagar Budaya
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,	BUPATI BANYUMAS,
Menimbang:	Menimbang:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;</li> <li>2. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;</li> <li>3. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;</li> <li>4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan yang harus dilestarikan untuk kepentingan Negara dan merupakan jati diri suatu Daerah;</li> <li>b. bahwa pada perkembangannya di Kabupaten Banyumas terkait dengan Objek yang diduga Cagar Budaya mengalami peningkatan sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya dan dapat berpengaruh pada kelestarian atas benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya;</li> <li>c. bahwa berkaitan dengan Cagar Budaya di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya;</li> <li>d. bahwa Pelindungan dan pengelolaan tidak hanya diberlakukan untuk Cagar Budaya akan tetapi juga terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dicatat dan diberi Perlindungan hukum terhadapnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya;</li> </ol>

Meningat:	Meningat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</li> <li>6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);</li> </ol>

2011 -2031(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN : Menetapkan : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 angka yakni angka 13A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.</li> <li>5. Bupati adalah Bupati Banyumas.</li> <li>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas.</li> <li>7. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.</li> <li>8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.</li> <li>9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.</li> <li>10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.</li> <li>11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.</li> <li>12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>5. Bupati adalah Bupati Banyumas.</li> <li>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas.</li> <li>7. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.</li> <li>8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.</li> <li>9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.</li> <li>10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.</li> <li>11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.</li> <li>12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar</li> </ol>
---	--

<p>13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.</p> <p>14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.</p> <p>15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.</p> <p>16. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.</p> <p>17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.</p> <p>18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.</p> <p>21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.</p> <p>22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.</p> <p>23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai</p>	<p>Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.</p> <p>13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.</p> <p>13A. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.</p> <p>14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.</p> <p>15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.</p> <p>16. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.</p> <p>17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.</p> <p>18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.</p>
--	---

<p>Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.</p> <p>24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.</p> <p>25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.</p> <p>26. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.</p> <p>27. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat provinsi yang ditetapkan Gubernur.</p> <p>28. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan Bupati.</p> <p>29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.</p> <p>30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.</p> <p>31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.</p> <p>32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.</p> <p>33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.</p>	<p>21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.</p> <p>22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.</p> <p>23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.</p> <p>24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.</p> <p>25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.</p> <p>26. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.</p> <p>27. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat provinsi yang ditetapkan Gubernur.</p> <p>28. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan Bupati.</p> <p>29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.</p> <p>30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.</p> <p>31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara</p>
---	---

<p>34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.</p> <p>36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.</p> <p>37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.</p> <p>38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.</p> <p>39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.</p> <p>40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.</p> <p>41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.</p> <p>42. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.</p>	<p>Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.</p> <p>32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.</p> <p>33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.</p> <p>34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.</p> <p>36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.</p> <p>37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.</p> <p>38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.</p> <p>39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.</p> <p>40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.</p>
---	---

	<p>41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.</p> <p>42. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.</p>
<p><b>BAB II</b> <b>ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pancasila;</li> <li>b. Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>c. kenusantaraan;</li> <li>d. keadilan;</li> <li>e. ketertiban dan kepastian hukum;</li> <li>f. kemanfaatan;</li> <li>g. keberlanjutan;</li> <li>h. partisipasi; dan</li> <li>i. transparansi dan akuntabilitas.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;</li> <li>b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;</li> <li>c. memperkuat kepribadian bangsa;</li> <li>d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan</li> <li>e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Indonesia dan internasional.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.</p>	
<p><b>BAB III</b></p>	

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG	
Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas	
	2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;</li> <li>b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;</li> <li>c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;</li> <li>d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;</li> <li>e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;</li> <li>f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;</li> <li>g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;</li> <li>h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan</li> <li>i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;</li> <li>b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;</li> <li>c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;</li> <li>d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;</li> <li>e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;</li> <li>f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;</li> <li>g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;</li> <li>h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;</li> <li>i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya; dan</li> <li>j. melaksanakan Pendaftaran ODCB.</li> </ol>
Bagian Kedua Wewenang	

	3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kecamatan;</li> <li>c. menghimpun data Cagar Budaya;</li> <li>d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;</li> <li>e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;</li> <li>f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;</li> <li>g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;</li> <li>i. mengelola kawasan Cagar Budaya;</li> <li>j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;</li> <li>k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keperbukalaan;</li> <li>l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;</li> <li>n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;</li> <li>o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan</li> <li>p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.</li> </ol> <p>(2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan Register Nasional terhadap ODCB yang dimiliki atau dikuasai Setiap orang, hasil penemuan, dan/atau hasil pencarian;</li> <li>b. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>c. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kecamatan;</li> <li>d. menghimpun data Cagar Budaya;</li> <li>e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;</li> <li>f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;</li> <li>g. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;</li> <li>h. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;</li> <li>j. mengelola kawasan Cagar Budaya;</li> <li>k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;</li> <li>l. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keperbukalaan;</li> <li>m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>n. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;</li> <li>o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;</li> <li>p. menetapkan batas situs dan kawasan; dan</li> </ol>

<p>mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat Tim Ahli.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemeliharaan kawasan dan bangunan Cagar Budaya.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>q. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat Tim Ahli.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemeliharaan kawasan dan bangunan Cagar Budaya.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.</p> <p>(3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. menikmati keberadaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;</p>	

<p>b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;</p> <p>c. berperan serta dalam rangka pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. mendapatkan kompensasi atas kepemilikan situs Benda Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki menguasai Benda Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat.</p>	
<p><b>BAB V</b> <b>KRITERIA CAGAR BUDAYA</b></p>	
<p><b>Bagian Kesatu</b> <b>Benda, Bangunan, dan Struktur</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</p>	

<p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</p> <p>b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Struktur Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau</p> <p>b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p>Situs dan Kawasan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:</p> <p>a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan</p> <p>b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:</p> <p>a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;</li> <li>e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan</li> <li>f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PEMILIKAN DAN PENGUASAAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.</li> <li>(3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.</li> </ul>	

<p>(4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.</p> <p>(2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.</p> <p>(3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.</p>	

<p>(2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.</p> <p>(2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
	4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 BAB yakni BAB VIIA
<p>BAB VII PENEMUAN DAN PENCARIAN</p>	<p>BAB VIIA REGISTRASI ODCB</p>
<p>Bagian Kesatu Penemuan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.</p>	

<p>(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencarian</p>	
	<p>5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.</p> <p>(2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB harus mendaftarkan kepada Bupati tanpa dipungut biaya.</p> <p>(2) Pelaksanaan pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII REGISTER CAGAR BUDAYA</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23B</p> <p>(1) Pengkajian ODCB dilaksanakan oleh Tim Ahli cagar Budaya.</p> <p>(2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi;</li> <li>b. klasifikasi; dan</li> <li>c. penilaian kriteria ODCB.</li> </ol> <p>(3) Hasil Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan rekomendasi Penetapan status ODCB sebagai Cagar budaya atau bukan Cagar Budaya.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23C</p> <p>Bupati menetapkan status ODCB menjadi cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya melalui keputusan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.</p> <p>(2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.</p> <p>(4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.</p> <p>(4) (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengkajian</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.</p>	

<p>(3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.</p> <p>(4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penetapan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.</p> <p>(2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memasang tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

Bagian Keempat Pencatatan	
Pasal 31	
Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 32	
(1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah. (2) Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diawasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.	
Bagian Kelima Pemeringkatan	
Pasal 33	
Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	
Pasal 34	
Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.	
Pasal 35	
Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
Pasal 36	

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. musnah;</li> <li>b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;</li> <li>c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau</li> <li>d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.</li> </ol>	
Bagian Keenam Penghapusan	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.	
BAB IX PELESTARIAN	
Bagian Kesatu Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.	

<p>(3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.</p> <p>(4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.</p>	
<p>Pasal 40</p> <p>Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.</p>	
<p>Pasal 41</p> <p>Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelindungan</p>	
<p>Pasal 42</p> <p>Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.</p>	
<p>Paragraf 1</p> <p>Penyelamatan</p>	
<p>Pasal 43</p> <p>Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.</p>	
<p>Pasal 44</p> <p>(1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:</p> <p>a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan</p>	

<p>b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.</p> <p>(2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengamanan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.</p> <p>(2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p>	

<p>Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menemukannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Zonasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.</p> <p>(2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat wilayah kabupaten.</p> <p>(3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.</p> <p>(2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.</p> <p>(3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zona inti;</li> <li>b. zona penyangga;</li> <li>c. zona pengembangan; dan/atau</li> <li>d. zona penunjang.</li> </ul> <p>(4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pemeliharaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.</p> <p>(2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.</p> <p>(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.</p> <p>(3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan</p>	

<p>memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.</p> <p>(4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.</p> <p>(1) (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemilik, Pengelola dan/atau Penghuni bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimaksud.</p> <p>(2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat/dinyatakan sebagai warga Daerah teladan dalam hal pelestarian bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pemugaran</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.</p> <p>(2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:</p>	

<p>a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;</p> <p>b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;</p> <p>c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan</p> <p>d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.</p> <p>(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.</p> <p>(4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.</p>	
<p>Bagian Ketiga Pengembangan</p>	
<p>Paragraf 1 Umum</p>	
<p>Pasal 59</p>	
<p>(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.</p> <p>(2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:</p> <p>a. izin Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.</p> <p>(3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan</p>	

<p>ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.</p>	
<p>Paragraf 2 Penelitian</p>	
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.</p> <p>(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:</p> <p>a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan</p> <p>b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.</p> <p>(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.</p> <p>(4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	
<p>Paragraf 3 Revitalisasi</p>	
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.</p>	

<p>(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Adaptasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau</li> <li>b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.</li> </ol> <p>(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;</li> <li>b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau</li> <li>d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemanfaatan</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.</p> <p>(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.</p> <p>(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.</p> <p>(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.</p>	

<p>(3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.</p> <p>(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pemanfaatan dengan cara perbanyakkan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Pemanfaatan dengan cara perbanyakkan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakkan, kecuali dengan izin Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>TIM AHLI CAGAR BUDAYA</b></p>	
	<p>6. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.</p>

<p>(2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.</p> <p>(3) Masa bakti Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.</p> <p>(4) Keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang Pemerintah Daerah, 1 (satu) orang dari Akademisi, 1 (satu) orang Asosiasi pengembang, 1 (satu) orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat.</p> <p>(5) Kegiatan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>(2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Nasional.</p> <p>(3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.</p> <p>(4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;</li> <li>b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;</li> <li>c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;</li> <li>d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan</li> <li>e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p><b>BAB XI</b> <b>PENDANAAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau</li> <li>c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.</p>	

(4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.	
<b>BAB XII PENGAWASAN</b>	
Pasal 76	
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah. (2) Pengawasan sesuai dengan ayat (1) terhadap Benda Cagar Budaya beserta situs yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah \\ (3) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian, Perlindungan Cagar Budaya.	
<b>BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI</b>	7. Ketentuan BAB XIII dihapus.
Pasal 77	8. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
(1) Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa: a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; b. penetapan uang paksa, sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) atas keterlambatan per hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. pencabutan izin yang telah dilanggar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.	
<b>BAB XIV PENYIDIKAN</b>	

<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;</li> <li>b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;</li> <li>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</li> <li>d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;</li> <li>f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;</li> <li>g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;</li> <li>h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</li> <li>i. membuat dan menandatangani berita acara; dan</li> <li>j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.</li> </ol> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	
<p><b>BAB XV</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p>	
	<p>9. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pasal 23 ayat (3), Pasal 41, Pasal 50 ayat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41, Pasal 50 ayat (1) dan ayat</p>

<p>(1) dan ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 62, Pasal 72 dan Pasal 73 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>(2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 62, Pasal 72, dan Pasal 73, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dijatuhkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha; dan/atau</li> <li>b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.</li> </ol> <p>(2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang Cagar Budaya dikenai tindakan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau</li> <li>b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XVI</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XVII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	

Pasal 83 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.	
Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2015 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN	Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 27 Juli 2023 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN
Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd WAHYU BUDI SAPTONO	Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 27 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd WAHYU BUDI SAPTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 97	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2015)	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-122/2023)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA

I. UMUM	I. UMUM
<p>Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.</p> <p>Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.</p> <p>Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Pembentukan peraturan daerah tentang cagar budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa.</p>	<p>Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.</p> <p>Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.</p> <p>Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Pembentukan peraturan daerah tentang cagar budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa.</p>
II. PASAL DEMI PASAL	II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1	Pasal I

Cukup jelas.	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 2 Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.</p> <p style="text-align: center;">Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p style="text-align: center;">Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.</p> <p style="text-align: center;">Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.</p> <p style="text-align: center;">Huruf g</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II Cukup Jelas</p>

<p>Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.</p> <p>Huruf h</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.</p> <p>Huruf i</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.</p>	
<p>Pasal 3 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 4 Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.</p>	
<p>Pasal 5 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 6 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 7 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 8 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 9 Ayat (1)</p> <p>Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam</p>	

<p>keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.</p> <p style="text-align: center;">Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11 Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.</p> <p style="text-align: center;">Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.</p> <p style="text-align: center;">Huruf c Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12 Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.</p>	

<p>Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.</p>	
<p>Pasal 13 Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Huruf b Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 14 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.</p> <p>Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e</p>	

<p>Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.</p> <p style="text-align: center;">Huruf f Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.</p> <p>Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17 Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.</p>	

Pasal 18 Cukup jelas.	
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.	
Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah.	
Pasal 21 Cukup jelas.	
Pasal 22 Cukup jelas.	
Pasal 23 Cukup jelas.	
Pasal 24 Cukup jelas.	
Pasal 25 Cukup jelas.	
Pasal 26 Cukup jelas.	
Pasal 27	

Cukup jelas.	
Pasal 28 Cukup jelas.	
Pasal 29 Cukup jelas.	
Pasal 30 Cukup jelas.	
Pasal 31 Cukup jelas.	
Pasal 32 Cukup jelas.	
Pasal 33 Cukup jelas.	
Pasal 34 Cukup jelas.	
Pasal 35 Cukup jelas.	
Pasal 36 Cukup jelas.	
Pasal 37 Cukup jelas.	
Pasal 38 Cukup jelas.	
Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)	

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.	
Pasal 40 Cukup jelas.	
Pasal 41 Cukup jelas.	
Pasal 42 Cukup jelas.	
Pasal 43 Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, dan gempa bumi.	
Pasal 44 Cukup jelas.	
Pasal 45 Cukup jelas.	
Pasal 46 Cukup jelas.	
Pasal 47 Cukup jelas.	
Pasal 48 Cukup jelas.	
Pasal 49 Cukup jelas.	
Pasal 50 Cukup jelas.	
Pasal 51 Cukup jelas.	
Pasal 52 Cukup jelas.	
Pasal 53	

Cukup jelas.	
<p>Pasal 54</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p>	
<p>Pasal 55</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 56</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 57</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 58</p>	

<p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.</p> <p>Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.</p> <p>Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.</p> <p>Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p>Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Cukup jelas.</p>	

Pasal 62 Cukup jelas.	
Pasal 63 Cukup jelas.	
Pasal 64 Cukup jelas.	
Pasal 65 Cukup jelas.	
Pasal 66 Cukup jelas.	
Pasal 67 Cukup jelas.	
Pasal 68 Cukup jelas.	
Pasal 69 Cukup jelas.	
Pasal 70 Cukup jelas.	
Pasal 71 Cukup jelas.	
Pasal 72 Cukup jelas.	
Pasal 73 Cukup jelas.	
Pasal 74 Cukup jelas.	
Pasal 75 Cukup jelas.	
Pasal 76 Cukup jelas.	
Pasal 77	

Cukup jelas. Pasal 78	
Cukup jelas. Pasal 79	
Cukup jelas. Pasal 80	
Cukup jelas. Pasal 81	
Cukup jelas. Pasal 82	
Cukup jelas. Pasal 83	
Cukup jelas. Pasal 84	
Cukup jelas. Pasal 85	
	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 82